Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 276-283
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20826675

Pengaruh Diplomasi Mineral Kritis Tiongkok Terhadap Kebijakan Hirilisasi Nikel Indonesia

The Impact of China's Critical Minerals Diplomacy on Indonesia's Nickel Downstreaming Policy

Aurelia Marlin Kattu Taula'bi'
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin
Email: zukhruufii@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of China's critical mineral diplomacy on Indonesia's nickel downstreaming policy during the 2014–2024 period. Critical minerals, particularly nickel, have become strategic commodities in the global energy transition due to their role in electric vehicle batteries and renewable energy industries. Indonesia, as the country with the largest nickel reserves, has implemented a downstreaming policy to increase added value and strengthen its position in the global supply chain. However, the implementation of this policy cannot be separated from China's involvement as the main investor in Indonesia's nickel processing sector. This research employs a qualitative method with an explanatory approach through literature study. The findings indicate that China's critical mineral diplomacy is carried out through foreign direct investment, industrial infrastructure development, technology transfer, and global supply chain integration. This diplomacy contributes to accelerating Indonesia's downstreaming policy but also creates dependency on foreign capital and technology. Therefore, Indonesia's downstreaming policy is influenced not only by domestic factors but also by international political economy dynamics.
Keywords: *Critical Mineral Diplomacy; Nickel Downstreaming; Chinese Investment; International Political Economy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diplomasi mineral kritis Tiongkok terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dalam periode 2014–2024. Mineral kritis, khususnya nikel, menjadi komoditas strategis dalam era transisi energi global karena perannya dalam industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia menerapkan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan Tiongkok sebagai investor utama dalam sektor pengolahan nikel di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis Tiongkok dilakukan melalui investasi langsung, pembangunan infrastruktur industri, transfer teknologi, serta integrasi rantai pasok global. Diplomasi tersebut berkontribusi dalam mempercepat kebijakan hilirisasi Indonesia, namun juga menimbulkan ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika ekonomi politik internasional.
Kata kunci: *diplomasi Mineral Kritis; Hilirisasi Nikel; Investasi Tiongkok; Ekonomi Politik Internasional*

Article Info
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dinamika ekonomi global mengalami pergeseran signifikan yang ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap sumber daya alam strategis, khususnya mineral kritis. Mineral kritis merupakan jenis mineral yang memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi karena perannya dalam mendukung perkembangan teknologi modern, namun memiliki risiko pasokan akibat keterbatasan cadangan, distribusi geografis yang tidak merata, serta tingginya permintaan global. Perkembangan teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik telah mendorong lonjakan kebutuhan terhadap mineral seperti nikel, kobalt, dan litium, yang menjadi komponen utama dalam produksi baterai. Kondisi ini kemudian menjadikan mineral kritis sebagai instrumen penting dalam persaingan ekonomi dan geopolitik antarnegara.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam peta ekonomi global karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan baku utama dalam industri baterai kendaraan listrik yang saat ini menjadi fokus transisi energi global menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Potensi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Kebijakan hilirisasi nikel mencapai titik penting ketika pemerintah secara resmi melarang ekspor bijih nikel pada tahun 2020. Kebijakan ini mendorong percepatan pembangunan smelter dan kawasan industri berbasis nikel di berbagai wilayah, seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Melalui kebijakan ini, Indonesia berupaya mentransformasikan diri dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun demikian, proses hilirisasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, melainkan juga oleh dinamika eksternal yang melibatkan aktor-aktor global.

Salah satu aktor eksternal yang memiliki peran dominan dalam sektor hilirisasi nikel Indonesia adalah Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok menjadi investor terbesar dalam pembangunan industri pengolahan nikel di Indonesia. Keterlibatan Tiongkok tidak hanya terbatas pada investasi, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur industri, transfer teknologi, serta integrasi dalam rantai pasok global. Strategi ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok seperti *Going Out Policy* dan *Belt and Road Initiative (BRI)*, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh ekonomi sekaligus mengamankan pasokan sumber daya strategis bagi kebutuhan industri domestiknya.

Keterlibatan intensif Tiongkok dalam sektor nikel Indonesia menunjukkan adanya praktik diplomasi mineral kritis, yaitu strategi negara dalam mengamankan akses jangka panjang terhadap sumber daya mineral strategis melalui berbagai instrumen ekonomi dan politik. Diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam rantai pasok global, khususnya dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok tidak lagi bersifat sederhana sebagai hubungan perdagangan, melainkan berkembang menjadi hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi dalam kerangka ekonomi politik internasional.

Meskipun kebijakan hilirisasi nikel Indonesia sering dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, berbagai kritik juga muncul terkait meningkatnya ketergantungan terhadap investasi dan teknologi asing, khususnya dari Tiongkok. Ketergantungan ini berpotensi menimbulkan risiko struktural, seperti dominasi teknologi, ketimpangan posisi tawar dalam kerja sama, serta terbatasnya kemampuan industri nasional untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, tekanan dari aktor global lain, seperti gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi juga berada dalam arena persaingan geopolitik global.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi, lingkungan, dan industrialisasi. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara diplomasi mineral kritis Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, meningkatnya peran Tiongkok sebagai aktor utama dalam sektor ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan nasional

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk diplomasi mineral kritis yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia serta bagaimana diplomasi tersebut memengaruhi kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dalam periode 2014–2024. Penelitian ini

menjadi penting karena tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi politik international, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara kekuatan eksternal dan kebijakan domestik dalam pengelolaan sumber daya strategis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hubungan antara diplomasi mineral kritis Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, serta dinamika hubungan yang terjadi dalam konteks ekonomi politik internasional. Sementara itu, sifat eksplanatif digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga berupaya menjelaskan keterkaitan dan pengaruh antara variabel yang diteliti.

Fokus penelitian ini terletak pada analisis diplomasi mineral kritis Tiongkok sebagai variabel independen dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia sebagai variabel dependen dalam periode 2014–2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada intensifikasi kebijakan hilirisasi di Indonesia serta meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam sektor pengolahan nikel melalui investasi dan kerja sama industri. Dengan demikian, periode tersebut dianggap representatif untuk melihat dinamika hubungan antara kedua variabel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah Indonesia, laporan investasi, publikasi resmi perusahaan, serta berita dan laporan industri yang berkaitan dengan sektor nikel. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik diplomasi mineral kritis Tiongkok serta perkembangan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data yang dipilih adalah data yang mampu menjelaskan bentuk-bentuk diplomasi mineral kritis, seperti investasi, pembangunan infrastruktur industri, transfer teknologi, serta integrasi rantai pasok global. Selain itu, data yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, seperti regulasi pemerintah, pembangunan smelter, serta perkembangan industri nikel juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mendukung analisis hubungan antara variabel penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif-eksplanatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan diplomasi mineral kritis Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan dalam memahami pola hubungan antarvariabel. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menjelaskan bagaimana diplomasi mineral kritis Tiongkok memengaruhi kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penalaran deduktif, yaitu dengan memulai analisis dari teori atau konsep umum, kemudian diterapkan pada kasus khusus yang diteliti. Dalam hal ini, teori ekonomi politik internasional dan diplomasi ekonomi digunakan sebagai landasan untuk memahami

praktik diplomasi mineral kritis Tiongkok, yang kemudian dianalisis dalam konteks kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara konsep teoretis dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh dapat diverifikasi sehingga meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis secara kritis terhadap data yang digunakan, sehingga dapat menghindari bias dalam interpretasi.

Dengan metode penelitian yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara diplomasi mineral kritis Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Pendekatan kualitatif eksplanatif yang digunakan tidak hanya memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mekanisme pengaruh yang melatarbelakanginya dalam kerangka ekonomi politik internasional.

HASIL

Dinamika Diplomasi Mineral Kritis Tiongkok di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis Tiongkok di Indonesia berkembang secara signifikan sejak diberlakukannya kebijakan hilirisasi nikel pada tahun 2014. Dinamika ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam sektor pertambangan dan pengolahan nikel melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi. Tiongkok memanfaatkan momentum kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruhnya dalam rantai pasok global, khususnya dalam industri baterai kendaraan listrik.

Keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi jangka panjang dalam mengamankan pasokan bahan baku industri. Dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap nikel, Tiongkok secara aktif membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis yang dilakukan Tiongkok tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.

Bentuk-Bentuk Diplomasi Mineral Kritis Tiongkok

Diplomasi mineral kritis Tiongkok di Indonesia diwujudkan dalam beberapa bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, investasi langsung dalam pembangunan industri pengolahan nikel menjadi instrumen utama yang digunakan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok berperan besar dalam pembangunan smelter dan kawasan industri yang terintegrasi, sehingga mempercepat proses industrialisasi di Indonesia.

Kedua, pembangunan infrastruktur industri menjadi bagian penting dari strategi diplomasi tersebut. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay berkembang menjadi pusat pengolahan nikel yang terhubung dengan jaringan industri global. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang memperkuat posisi Tiongkok dalam rantai nilai global. Ketiga, transfer teknologi menjadi aspek penting dalam kerja sama ini. Melalui keterlibatan dalam proses produksi, perusahaan Tiongkok membawa teknologi pengolahan mineral yang lebih maju. Namun, transfer teknologi ini tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kemandirian teknologi Indonesia, sehingga masih terdapat ketergantungan terhadap pihak asing.

Keempat, integrasi rantai pasok global menjadi tujuan utama dari diplomasi mineral kritis Tiongkok. Dengan menguasai berbagai tahapan produksi, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir, Tiongkok mampu menciptakan kontrol yang kuat terhadap industri nikel global.

Perkembangan Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukan secara intensif pada tahun 2014. Pemerintah Indonesia berupaya mendorong

industrialisasi melalui larangan ekspor bahan mentah serta pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat struktur industri nasional.

Dalam implementasinya, kebijakan hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perubahan struktur ekonomi di daerah penghasil nikel. Kawasan industri yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada investasi asing dan keterbatasan teknologi domestik.

Keterkaitan Diplomasi Tiongkok dengan Hilirisasi Nikel

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara diplomasi mineral kritis Tiongkok dan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Diplomasi yang dilakukan Tiongkok melalui investasi dan kerja sama industri berkontribusi dalam mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi. Kehadiran investor Tiongkok memberikan dukungan finansial dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun industri pengolahan nikel.

Namun demikian, keterkaitan ini juga menunjukkan adanya hubungan yang bersifat asimetris. Indonesia sebagai negara penerima investasi memiliki ketergantungan terhadap modal dan teknologi yang dimiliki oleh Tiongkok. Hal ini berpotensi memengaruhi arah kebijakan hilirisasi, di mana kebijakan yang diambil cenderung menyesuaikan dengan kepentingan investor.

Selain itu, keterkaitan ini juga terlihat dalam integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global yang didominasi oleh Tiongkok. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi domestik, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika ekonomi global yang melibatkan aktor-aktor internasional.

Dampak Ekonomi dan Strategis

Dampak dari diplomasi mineral kritis Tiongkok terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak ekonomi dan dampak strategis. Dari sisi ekonomi, investasi Tiongkok memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan industri, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia.

Namun, dari sisi strategis, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan ketergantungan terhadap pihak asing. Dominasi investasi dan teknologi Tiongkok dalam sektor nikel dapat membatasi kemandirian Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, posisi Indonesia dalam rantai pasok global cenderung berada pada tahap produksi, sementara penguasaan teknologi dan pasar masih didominasi oleh negara lain.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari kerja sama tersebut tanpa kehilangan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya strategis.

PEMBAHASAN

Analisis Diplomasi Mineral Kritis dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional

Berdasarkan hasil penelitian, diplomasi mineral kritis Tiongkok tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai bagian dari strategi ekonomi politik internasional yang bersifat struktural. Dalam perspektif ini, hubungan antara Tiongkok dan Indonesia mencerminkan adanya interaksi antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik yang saling memengaruhi. Tiongkok sebagai negara dengan kapasitas ekonomi besar memiliki kemampuan untuk menggunakan instrumen ekonomi, seperti investasi dan teknologi, sebagai alat untuk memperluas pengaruhnya di negara mitra.

Diplomasi mineral kritis yang dilakukan Tiongkok menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengamankan akses terhadap sumber daya strategis sekaligus menguasai rantai pasok global. Dengan menguasai tidak hanya bahan mentah tetapi juga proses pengolahan, Tiongkok dapat menciptakan posisi dominan dalam industri global, khususnya dalam sektor baterai dan kendaraan listrik. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari sistem produksi global yang dikendalikan oleh kekuatan eksternal.

Pengaruh Diplomasi Tiongkok terhadap Arah Kebijakan Hilirisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Pengaruh ini tidak bersifat langsung dalam bentuk intervensi kebijakan, tetapi bekerja melalui mekanisme struktural yang membentuk pilihan kebijakan pemerintah Indonesia. Kebutuhan terhadap investasi dan teknologi mendorong pemerintah untuk membuka ruang yang lebih besar bagi keterlibatan Tiongkok dalam sektor industri nikel.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan hilirisasi mengalami percepatan karena adanya dukungan dari investor asing, khususnya Tiongkok. Pembangunan smelter dan kawasan industri yang masif tidak terlepas dari peran investasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi mineral kritis berfungsi sebagai katalisator dalam implementasi kebijakan hilirisasi. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap investor asing juga memunculkan potensi penyesuaian kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan pihak eksternal.

Relasi Asimetris dan Ketergantungan Struktural

Dalam kerangka ekonomi politik internasional, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam sektor nikel dapat dikategorikan sebagai relasi yang bersifat asimetris. Tiongkok memiliki keunggulan dalam hal modal, teknologi, dan akses pasar global, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam ketersediaan sumber daya alam. Ketimpangan ini menciptakan hubungan saling ketergantungan, namun dengan posisi tawar yang tidak seimbang.

Ketergantungan struktural ini terlihat dari dominasi investasi dan teknologi Tiongkok dalam industri pengolahan nikel di Indonesia. Meskipun Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dari kerja sama tersebut, seperti peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja, ketergantungan terhadap pihak asing dapat membatasi kemandirian dalam jangka panjang. Dalam kondisi ini, kebijakan hilirisasi tidak sepenuhnya berada dalam kontrol domestik, melainkan dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang lebih luas.

Implikasi terhadap Kemandirian Industri Nasional

Salah satu tujuan utama dari kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kemandirian industri nasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok dalam skala besar menimbulkan dilema antara percepatan pembangunan industri dan upaya mencapai kemandirian tersebut. Di satu sisi, investasi dan teknologi dari Tiongkok memungkinkan Indonesia untuk membangun industri pengolahan nikel dengan cepat. Di sisi lain, dominasi pihak asing dalam sektor strategis dapat menghambat transfer teknologi yang optimal dan memperkuat ketergantungan jangka panjang.

Implikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari peningkatan produksi atau investasi, tetapi juga dari kemampuan Indonesia untuk mengembangkan kapasitas teknologi dan industri secara mandiri. Tanpa adanya strategi yang jelas dalam penguatan kapasitas domestik, hilirisasi berpotensi hanya memindahkan posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi bagian dari rantai produksi global tanpa kontrol penuh atas nilai tambah yang dihasilkan.

Konfirmasi terhadap Hipotesis Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa semakin intensif diplomasi mineral kritis Tiongkok, maka semakin kuat pengaruhnya terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Pengaruh tersebut terlihat dalam percepatan pembangunan industri, peningkatan investasi, serta integrasi Indonesia dalam rantai pasok global yang didominasi oleh

Tiongkok.

Namun, pengaruh ini tidak bersifat deterministik, melainkan bekerja melalui proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara faktor domestik dan eksternal. Kebijakan hilirisasi Indonesia tetap didorong oleh kepentingan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh struktur kekuatan global yang membatasi ruang kebijakan yang tersedia. Dengan demikian, diplomasi mineral kritis Tiongkok dapat dipahami sebagai faktor penting yang membentuk arah dan dinamika kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.

SIMPULAN

Diplomasi mineral kritis Tiongkok memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Pengaruh tersebut bersifat struktural melalui investasi, teknologi, dan integrasi rantai pasok global. Kebijakan hilirisasi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika geopolitik global.

SARAN

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kemandirian industri dengan diversifikasi investasi dan peningkatan kapasitas teknologi domestik. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memastikan transfer teknologi berjalan optimal dan tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang.

REFERENSI

Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi ekonomi Indonesia di dalam rezim ekonomi G20 pada masa pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies, 5*(1), 47–68.

Barizi, M. H., & Triarda, R. (2023). Rantai pasokan global dan nasionalisme sumber daya alam: Kajian terkait hilirisasi nikel di Indonesia. *Indonesian Journal of International Relations, 7*(2), 312–338.

Baskoro, A. (2025). ESG dan tata kelola hilirisasi critical minerals: Mampukah infrastruktur hukum Indonesia menjamin keberlanjutan dan keadilan? *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14*(1).

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security, 44*(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.

Jumono, S., Putra, A., & Mala, C. M. F. (2024). *Memahami transformasi struktural dengan metode shift-share pada sektor pertambangan*. Cipta Media Nusantara.

Mery, L. (2025). Kontestasi hukum internasional dalam kebijakan hilirisasi Indonesia. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 82–98).

Sahl, D. F., & Djati, I. G. S. M. (2025). Aspek teknologi, politik kebijakan, dan ekonomi dalam kebijakan hilirisasi sumber daya nikel Indonesia. *Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral, 6*(1), 21–31.

Sari, C. D. P., & Ibrahim, H. (2023). Peran politik dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional. *Jurnal Minfo Polgan, 12*(2), 2464–2473.

Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). *Geopolitik dan geostrategi pertahanan: Tantangan keamanan global*. Indonesia Emas Group.

Sikumbang, S. (2025). Studi perencanaan pembangunan infrastruktur listrik perdesaan di Provinsi Papua Selatan. *Buletin Perencanaan Kementerian ESDM*.

Tama, I. P., Novareza, O., Hardiningtyas, D., Yuniarti, R., & Nuzula, N. F. (2023). *Potensi masa depan elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

Wau, F. T., Kiton, M. A., Wau, M., & Fau, J. F. (2024). Analisis strategis kebijakan hilirisasi mineral dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal Publicuho, 7*(3), 1215–1224.

Xu, Y. (2022). China's critical minerals strategy and global supply chain governance. *Resources Policy, 77*, Article 102688. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102688

Zed, E. Z., Komarudin, P., & Napitupulu, N. M. T. (2025). *Ekonomi internasional*. Takaza Innovatix Labs.